

SINAU SEJARAH 'YOGYA KEMBALI'

Paniradya Terus Informasikan Sejarah Yogya

YOGYA (KR) - Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersinggungan dengan sejarah, terus berusaha untuk menginformasikan kepada masyarakat, tentang hari-hari bersejarah yang ada di Yogyakarta.



KR-Wawan Isnawan
Aris Eko Nugroho SP MSI

"Kita berharap apa yang sudah ada di Yogyakarta ini tidak menjadi hilang, tapi menjadi bagian nilai dan arti penting yang selalu kita jaga secara bersama-sama," kata Paniradya Pati Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho SP MSI.

Paniradya Kaistimewan, lanjutnya, melalui berbagai macam media, baik offline maupun online terus berusaha untuk menyebarkan informasi dan mengenalkan sejarah yang ada di Yogyakarta.

Untuk aktivitas offline, ada kegiatan sinau sejarah di SMA yang diinisiasi Paniradya Kaistimewan bersama Sekber Keistimewaan. Selain itu ada juga focus group discussion (FGD) dan podcast. Ada pula aktivitas yang dilakukan bekerja sama dengan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia untuk lebih mengenalkan sejarah yang ada di Yogyakarta.

Untuk mengenalkan sejarah melalui media online, ada berbagai macam cara yang dilakukan, antara lain melalui channel YouTube berupa film dokumenter, dan menampilkan sejarawan yang bercerita tentang bagaimana sejarah di Yogyakarta.

"Semoga saja apa yang dilakukan pemerintah daerah terus kita sempurnakan, sehingga generasi muda tidak melupakan sejarah yang ada di Yogyakarta, tapi menjadi titik tolak untuk menjadikan hal yang lebih penting untuk masa depan, untuk menyempurnakan aktivitas di masa yang akan datang," katanya.

Memperingati peristiwa bersejarah 'Yogya Kembali', Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Keistimewaan dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) DIY, menggelar Sinau Sejarah Keistimewaan 'Yogya Kembali' bertema 'Kembali ke Kedaulatan Indonesia', Sabtu (29/6), pukul 09.00-12.00 di Pendapa Wiyata Praja, Kepatihan.

Acara yang didanai dengan dana keistimewaan (danais) ini ditayangkan *live streaming* melalui channel YouTube Paniradya Kaistimewan DIY.

Sinau sejarah ini akan diawali pemutaran video dokumenter 'Gold History Yogya

Kembali', dilanjutkan Dialog Keistimewaan 'Kembali ke Kedaulatan Indonesia' dengan narasumber Aris Eko Nugroho SP MSI (Paniradya Pati Kaistimewan DIY), Julianto Ibrahim MHum (Sejarawan UGM), dan Eko Isdianto (Ketua Komunitas Djogja '45) dipandu Cintia Rina. Acara ini juga dimeriahkan hiburan.

Menurut Aris, peristiwa sejarah Yogya Kembali ini menjadi cerita yang harus setiap tahun kita ulang, agar masyarakat Yogyakarta semakin memahami juga mendalam bahwa di Yogyakarta ini ada peristiwa bersejarah yang memberikan arti bagi Indonesia.

"Untuk itu kami (Paniradya Kaistimewan) tentu saja berusaha merawat sejarah yang ada di Yogyakarta, karena keistimewaan di Yogyakarta itu juga terdiri dari sejarah dan asal usul. Artinya, kita tidak boleh melupakan sejarah yang ada di tempat kita," katanya.

Dengan sejarah, kata Aris, kita bisa mengetahui banyak orang atau masyarakat yang ada pada peristiwa sejarah itu. Dengan sejarah kita juga bisa menilai sesuatu yang pernah terjadi. Kita juga bisa melakukan aktivitas yang menyempurnakan jika sejarah itu ada yang kurang berkenan.

"Banyak yang bisa kita lakukan dengan sejarah yang ada di Yogyakarta, tapi yang lebih penting bagaimana kita mencoba merawat dan menjaga sejarah, kita kembangkan menjadi yang lebih luar biasa dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat di Yogyakarta," kata Aris pula. (Wan)

PERGUB DIY NO 24 TAHUN 2024

Tanah Kalurahan Untuk Kesejahteraan Masyarakat



KR-Wawan Isnawan
Puji Winanti STP MPA

YOGYA (KR) - Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada 7 Mei 2024 telah menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY No 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

"Kita berharap, tanah kalurahan yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, swasta dan pemerintah baik itu di DIY maupun di kabupaten kota, perlu untuk kemudian statusnya diperjelas, sehingga apabila ada yang belum memiliki izin segera dilakukan izin," kata Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho SP MSI.

Dengan adanya izin, lanjut Aris, maka status tanah menjadi jelas. "Dengan kejelasan itu, tanah di kalurahan bisa dimanfaatkan optimal tidak hanya oleh pemerintah maupun swasta bahkan masyarakat," kata Aris.

Lebih lanjut dikatakan, sementara ini Paniradya Kaistimewan melalui sumber dana keistimewaan (danais) dari pemerintah pusat mengalokasikan beberapa aktivitas yang dilakukan di tanah kalurahan, baik berupa Lumbug Mataraman, BKK Pertanian, dan juga yang berkaitan dengan BKK kawasan terpadu maupun berbagai aktivitas lainnya. Prinsipnya sesuai 11 kebijakan strategis dari Gubernur DIY.

"Kita berharap agar tanah

yang ada di kalurahan bisa dimanfaatkan optimal sesuai dengan regulasi yang ada, dan juga sesuai dengan tujuan yang ada berkaitan dengan Undang-undang Keistimewaan, yaitu dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kalurahan," kata Aris pula.

Sedangkan Kepala Bidang Urusan Pertanahan Paniradya Kaistimewan DIY, Puji Winanti STP MPA mengatakan, Pergub DIY No 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan diterbitkan untuk memberikan pengaturan yang lebih jelas, lebih tegas, dan lebih rinci mengenai pemanfaatan tanah kalurahan, sehingga pemerintah kalurahan memiliki dasar hukum yang jelas dalam pemanfaatan tanah kalurahan.

"Diharapkan pemerintah kalurahan dapat memaksimalkan pemanfaatan tanah kalurahan untuk kegiatan pertanian oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kalurahan," kata Puji Winanti STP MPA kepada KR di Kantor Paniradya Kaistimewan DIY, Kepatihan Danurejan Yogyakarta, Jumat (27/6).

Puji mengatakan, terbitnya Pergub DIY No 24 Tahun 2024 ini sangat berdampak positif bagi masyarakat kalurahan, dikarenakan masyarakat dapat memanfaatkan tanah kalurahan untuk kegiatan

tan pertanian yang hasilnya kembali lagi ke masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.

Sedangkan bagi investor aturan mainnya lebih jelas dan batasan waktu yang digunakan ketika akan memanfaatkan tanah kas desa.

Adanya Pergub ini juga bermanfaat untuk pemerintah daerah sebagai panduan dalam mengawal dan menjalankan fungsi pengawasan serta pemanfaatan tanah kas kalurahan.

Apabila terjadi dinamika pada urusan pertanahan yang berkaitan dengan kebijakan pada Pergub DIY No 24 Tahun 2024, menurut Puji, akan segera dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan dinas terkait serta tim yang telah diamankan dalam Pergub tersebut.

Mencari alternatif bahan pertimbangan teknis sebagai upaya untuk mencari solusi dari dinamika yang muncul. "Segera melaksanakan solusi yang telah disepakati sebagai langkah responsif dalam hal penyelesaian permasalahan," katanya.

Sedangkan mengenai kebijakan pemanfaatan Tanah Kalurahan Urusan Pertanian, menurut Puji, dimaksimalkan seluas-luasnya untuk tujuan pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan khususnya kesejahteraan

an masyarakat.

"Salah satu bentuk pemanfaatan Tanah Kalurahan yang sudah berjalan dari tahun 2022-2024 adalah kegiatan pertanian untuk Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kalurahan melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pertanian, yang hasilnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelas Puji.

Menurut Puji, aktivitas pemanfaatan tanah kasultanan yang difasilitasi dana keistimewaan (danais) sudah cukup banyak, di antaranya ada Lumbug Mataraman, BKK Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kalurahan, pembuatan balai budaya, dan BKK Kawasan Terpadu yang seluruhnya dimaksimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.

Puji mencontohkan pada pelaksanaan BKK Pertanian, pada tahun 2024 telah mampu memberdayakan KK miskin dengan total sejumlah 471 KK miskin untuk menggarap dan mengelola pertanian di tanah kalurahan dengan luas total sejumlah 227.132 meter persegi yang tersebar di 10 kalurahan yang ada di DIY seperti Kalirejo, Merdikorejo, Caturharjo, Glagaharjo, Pondokrejo, Kaliagung, Sriharjo, Sidoharjo, dan Kebonharjo.

"Dari data akhir tahun 2023, keberhasilan pertanian di tanah kalurahan juga menghasilkan keuntungan bagi kalurahan penggarap," katanya.

Sebagai contoh di Kalurahan Caturharjo di mana dengan modal sekitar Rp 300 juta sudah menghasilkan lebih dari Rp 900 juta, sehingga dapat diartikan bahwa ada keuntungan lebih dari Rp 600 juta, dan keuntungan tersebut tetap berada di masyarakat.

Contoh lainnya, lanjut Puji, di Kalurahan Merdikorejo, dari anggaran Rp 77 juta pada tahun 2023 telah menghasilkan hasil panen senilai Rp190 juta, dan Kalurahan Pondokrejo dari anggaran Rp 122 juta pada tahun 2023 telah menghasilkan Rp 590 juta. (Wan)

LIHAT DAYA BELI MASYARAKAT

Harga BBM Nonsubsidi Diserahkan Pertamina

JAKARTA (KR) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyerahkan keputusan perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi, seperti Pertamina series serta Dex series pada Juli 2024 kepada Pertamina dan Kementerian BUMN. Tentunya keputusan tersebut melihat daya beli masyarakat.

"Ya, itu kan nonsubsidi. Mau naik juga (Pertamina) melihat daya beli masyarakat," ujar Arifin ketika ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Jakarta, Jumat (28/6).

Ketika disinggung apakah pemerintah mengizinkan Pertamina untuk menaikkan harga BBM nonsubsidi, Arifin menyinggung bahwasanya Pertamina berkoordinasi dengan Kementerian BUMN. dengan demikian, keputusan terkait naik maupun tetapnya harga BBM nonsubsidi pada Juli berada di tangan Pertamina dan Kementerian BUMN. "Pertamina kan di bawah BUMN," jelasnya.

Untuk diketahui, pemerintah telah menahan kenaikan harga BBM, baik subsidi dan nonsubsidi, sejak awal tahun 2024. Arifin Tasrif dalam kesempatan sebelumnya mengungkapkan pertimbangan pemerintah menahan harga BBM untuk tetap stabil hingga Juni 2024, yakni untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat setelah pandemi Covid-19. Gejala harga minyak dunia, eskalasi konflik di Timur Tengah, hingga pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS membuat kompensasi dan anggaran subsidi BBM di dalam negeri membengkak.

Arifin juga mengatakan bahwa terkait kelanjutan

harga BBM subsidi dan nonsubsidi pada Juli akan dibahas bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Akan tetapi, hingga Jumat (28/6), Arifin mengungkapkan belum ada keputusan apakah harga BBM nonsubsidi akan naik pada Juli 2024. "(Keputusan harga) BBM belum putus," katanya.

Pada awal Juni, PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan tidak ada kenaikan harga untuk BBM nonsubsidi, yakni Pertamina series serta Dex series pada Juni 2024.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyampaikan, meski harga minyak dunia menunjukkan tren naik dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah, PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Patra Niaga, kembali tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi pada bulan Juni. (Ant/Has)-f

Firli Bahuri Dicegah ke LN 6 Bulan

JAKARTA (KR) - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) Silmy Karim memastikan, tersangka kasus dugaan pemerasan Firli Bahuri dicegah keluar negeri selama enam bulan atau sampai 25 Desember 2024.

"Ini perpanjangan kedua dari mulai 25 Juni 2024 sampai 6 bulan ke depan sampai 25 Desember 2024," ujar Silmy dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (28/6).

Ia pun menjelaskan permohonan pengekangan itu telah diajukan ke

Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Surat permohonan pengekangan dikirim hari Rabu, 25 Juni 2024.

"Pada tanggal 25 Juni 2024, permohonan yang disampaikan oleh atas nama Kapolri yang ditandatangani Kabareskrim. Permohonan bantuan pengekangan ke luar negeri atas nama tersangka Drs Firli Bahuri MSI," jelasnya.

Dalam kasus ini, Firli Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 22 November 2023. Firli dijerat dengan dugaan tindak pidana pembe-

rantasan korupsi berupa pemerasan atau gratifikasi atau suap terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI pada kurun 2020-2023.

Polda Metro Jaya belum menahan Firli, dan mengatakan sedang melakukan pengembangan dugaan korupsi tersebut ke dugaan tindak pidana lain. Firli telah mengajukan dua kali gugatan praperadilan. Gugatan pertama tidak diterima dan gugatan kedua dicabut dengan alasan penyempurnaan berkas. (Ant)-f

RI AKAN KEMBALIKAN 9 KERANGKA

Diduga Tentara Jepang di PD II

JAKARTA (KR) - Pemerintah Indonesia akan mengembalikan sembilan kerangka diduga tentara Jepang pada Perang Dunia II. Pada tahun 1944, sejarah telah mencatat, di wilayah yang kini disebut Indonesia pernah menjadi teater Perang Dunia (PD) II.

Pertempuran berlangsung di beberapa lokasi dan banyak kisah telah terjadi. Salah satu pertempuran terjadi antara tentara Jepang dan Amerika di Kepulauan Biak Numfor Papua. Setelah 80 tahun berlalu, Tim Teknis Gabungan Indonesia

dan Jepang berhasil mengumpulkan 9 kerangka manusia yang diduga kuat sebagai tentara Jepang yang gugur pada Perang Dunia II di Kabupaten Biak Numfor. Kerangka-kerangka tersebut kini telah sampai di Jakarta untuk diteliti lebih lanjut kepastiannya dengan menggunakan tes DNA.

"Penemuan sembilan kerangka ini merupakan hasil positif setelah pada 2019 terjadi penandatanganan kesepakatan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Jepang dengan Kemendikbudristek dan Kedubes

Jepang, mengenai usaha ekskavasi, sisa-sisa, jasad dari para serdadu Jepang yang meninggal waktu perang dunia II, khususnya di daerah Papua," ujar Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, Hilmar Farid, Jumat (28/6).

Terlepas dari sejarah masa lalu, katanya, upaya ini merupakan misi untuk memuliakan manusia, sekaligus pengingat agar tidak terulang di masa mendatang. Tim Teknis Gabungan Indonesia dan Jepang dibentuk sebagai tindak lanjut perjanjian kedua negara. (Ati)-f

SIDIK PUNGLI DI RUTAN KPK

Mardani Maming dan Husni Fahmi Diperiksa

JAKARTA (KR) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/6) memeriksa terpidana korupsi Mardani Maming dan Yoory Corneles. Keduanya menjadi saksi penyidikan perkara dugaan pemerasan dan pungutan liar di lingkungan Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK.

"Hari ini pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan di lingkungan Rutan Cabang KPK. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama Mardani H Maming, Husni Fahmi, dan Yoory Corneles, selaku warga binaan Lapas," kata Juru Bicara KPK Tesaa Mahardika SATA dikonfirmasi di Jakarta.

Selain itu KPK juga memeriksa dua saksi lainnya terkait perkara tersebut yakni pihak swasta bernama

Jefri Maulana Akbar dan I Nyoman Dhamantra. Namun, Tessa belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Sebelumnya, KPK juga memeriksa mantan anggota DPR RI Muhammad Azis Syamsudin. Yang bersangkutan diperiksa soal fasilitas yang diterimanya selama menjalani penahanan di Rutan Cabang KPK setelah memberikan sejumlah uang kepada salah satu tersangka dalam kasus tersebut.

KPK pada Rabu, 24 April 2024, mengumumkan pemecatan terhadap 66 orang pegawainya yang terlibat dalam perkara pungutan liar dan pemerasan di Rutan Cabang KPK. Hasil pemeriksaan itu menyatakan 66 orang pegawai KPK terbukti melanggar Pasal 4 huruf i; Pasal 5 huruf a;

dan Pasal 5 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Selanjutnya pada 17 April 2024, sekretaris jenderal KPK menetapkan keputusan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai PNS, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4) huruf c PP 94 Tahun 2021. KPK menerangkan pemberhentian tersebut efektif berlaku pada hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diserahkan kepada para pegawai tersebut.

Keputusan pemberhentian pegawai tersebut, sebagai bagian dari komitmen KPK menyelesaikan penanganan pelanggaran di internal hingga tuntas dan zero tolerance terhadap praktik-praktik korupsi. KPK juga telah menjatuhkan hukuman etik. (Ant/Has)-f



KR-Antara/Indrianto Eko Suwarsa

Tersangka mantan petugas pengamanan Rutan Cabang KPK Mahdi Aris (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.